

Analisis Kualitas Pelayanan, Pembangunan Akses Modal, dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Pesisir di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara

Annisa Ilimi Faried Lubis; Bakhtiar Efendi; Rahmat Sembiring

Abstrak

Pembangunan manusia adalah sebuah gambaran dari tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah yang meliputi sektor ekonomi dan sosial seperti kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, pembangunan sarana dan prasarana yang mempengaruhi pembangunan manusia secara langsung. Salah satu penyebab tidak meningkatnya pembangunan manusia adalah rendahnya kesejahteraan masyarakat. Nelayan di Desa Pahlawan memiliki rata-rata pendapatan dibawah upah minimum kota, sehingga mengakibatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan rendah. Saat ini pemerintah tengah menggalakkan pembangunan pesisir, sehingga penelitian ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan berbagai macam strategi pengembangan wilaah pesisir tersebut. Selain itu pembangunan pesisir yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir atau kesejahteraan nelayan merupakan hal yang sangat dinanti oleh masyarakat pesisir mengingat tingkat kesejahteraan nelayan pesisir umumnya tergolong rendah dan khususnya di desa Pahlawan tergolong sangat rendah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengkaji keberhasilan strategi peningkatan kesejahteraan masarakat pesisir yang tengah digalakkan, bagi para nelayan diharapkan mampu membuka pemikiran dan wawasan untuk menjadi manusia yang lebih berkualitas.

Kata Kunci : Kesejahteraan Nelayan, Kebijakan Pemerintah, Kualitas Pelayanan,

Pembangunan Akses Modal

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir salah satu kecenderungan baru dalam paradigma pembangunan di Indonesia. Setelah sekian lama wilayah laut dan pesisir menjadi wilayah yang terabaikan dan dilupakan dalam pembangunan di Indonesia. Kawasan pesisir merupakan suatu ekosistem yang khas yang dapat di lihat dari berbagai sudut pandang. Secara normatif, seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Ada banyak kegunaan yang mampu kita eksplorasi dari sumber kelautan yang kita miliki, salah satunya memberdayakan masyarakat pesisir sebagai konsumen utama yang akan memanfaatkan sektor kelautan tersebut. Hasil pengamatan dilapangan masyarakat di kawasan pesisir Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram bekerja sebagai nelayan. Meskipun cukup potensial namun tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pahlawan relatif masih rendah jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Begitu banyak kendala yang dihadapi masyarakat di kecamatan tanjung tiram antara lain, kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan akses modal dan pembangunan sarana dan prasarana dan minimnya alat tangkap dan faktor cuaca yang tidak menentu. Kekurangan modal ini juga sangat mengurangi aktivitas usaha masyarakat pesisir, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan.

Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Rumah Tangga	Penduduk	Persebaran Penduduk (%)
Sei Balai	92,64	6.604	26.914	7,09
Tanjung Tiram	173,79	14.714	63.728	16,80
Talawi	89,80	12.510	54.185	14,28
Lima Puluh	238,55	19.811	85.811	22,62
Air Putih	72,24	10.855	47.017	12,39
Sei Suka	171,47	12.238	53.010	13,97
Medang Deras	65,47	11.251	48.735	12,85
Total	904,96	87.592	379.400	100,00

Sumber : Barada, 2016

Hasil observasi awal yang dilakukan, strategi peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini sangat penting untuk dilakukan,

dimana saat ini pemerintah tengah menggalakkan pembangunan pesisir, sehingga penelitian ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan berbagai macam strategi peningkatan wilayah pesisir tersebut. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut.:

1. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara
2. Pembangunan akses modal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara
3. Kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara
4. Kualitas pelayanan, pembangunan akses modal dan kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara

TINJAUAN PUSTAKA

Kesejahteraan

Menurut BPS tahun 2015 mempublikasikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat rakyat yang terdiri dari berbagai aspek yaitu, pendidikan, kesehatan dan gizi, kependudukan, ketenagakerjaan, taraf dan konsumsi serta aspek sosial lain. Dalam publikasi ini hanya disajikan berbagai kondisi yang berkaitan dengan keenam aspek tersebut tetapi tidak ada angka khusus untuk mengukur kesejahteraan secara umum.

Peningkatan Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992, diacu oleh Nuryani 2007). Sedakan menurut Benhke dan Macdermid (2004) kesejahteraan didefinisikan sebagai kualitas hidup seseorang atau unit sosial lain kualitas hidup individu terdiri dari berbagai aspek, ekonomi, sosial maupun psikologisnya.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Kualitas pelayanan yang akan saya teliti di lihat dari pelayanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). BPJS yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemberian pelayanan kesehatan pada pasien BPJS menggunakan sistem rujukan berjenjang sesuai kebutuhan medis. Sistem ini dimulai dari Fasilitas Kesehatan (FasKes) tingkat pertama.

Masyarakat ikut aktif berpartisipasi mengawasi kinerja dan kualitas pelayanan BPJS. Kesehatan tidak akan ada lagi pihak-pihak tak bertanggung jawab yang berani memperdaya masyarakat. Dengan begitu, pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dapat membaik hingga akhirnya diharapkan dapat menjadi perpanjangan-tanganan Negara dalam memenuhi hak seluruh warga negara atas kesehatan.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor BSM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif BSM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian bantuan sosial mikro adalah bagaimana agar bantuan social tersebut dapat lebih tepat sasaran, diterima oleh yang benar-benar membutuhkannya. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh membutuhkannya.

Banyak program yang diperlukan berkaitan dengan penajaman dan pengenalan sasaran. Salah satu diantaranya adalah dengan mengembangkan test kebutuhan (*mean test*) sebagai salah satu instrument untuk meyakinkan bahwa dana bantuan social yang akan diberikan benar-benar sesuai dan tepat sasaran. Berbagai program bantuan social yang diberikan pemerintah pada akhirnya bermuara pada upaya untuk mendorong penduduk agar terlepas dari kemiskinan sehingga dengan demikian mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Makin banyak penduduk yang miskin makin banyak pula dana yang diperlukan untuk program social. Oleh karena itu salah satu strategi dalam pemberian bantuan sosial adalah bagaimana mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yang tampaknya menjadi salah satu fokus program bantuan sosial yang perlu mendapat prioritas tinggi.

Pembangunan Akses Modal

Kredit produksi diberikan kepada peminjam untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif, sedangkan kredit konsumsi diberikan kepada peminjam yang kekurangan dana untuk membiayai konsumsi keluarga seperti biaya anak sekolah. Menurut Suyatno (2006), didalam transaksi kredit terdapat unsur-unsur kredit, yaitu kepercayaan merupakan keyakinan dari pihak pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang dan barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Kepercayaan ini timbul karena sebelumnya pihak pemberi kredit telah melakukan penyelidikan dan analisa terhadap kemampuan dan kemaun calon nasabah dalam membayar kembali kredit yang akan disalurkan. Suatu masa akan memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterimanya kembali pada masa yang akan datang. *Degree of risk*, suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang. Semakin lama jangka kredit yang diberikan semakin tinggi resiko yang dihadapinya karena dalam waktu tersebut terdapat juga unsur ketidakpastian yang tidak diperhitungkan.

Perumusan Analisis AHP Di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Alat analisis yang digunakan adalah '*Analytical Hierarchy Process*' (AHP) yang telah dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1971 (Kuncoro, M, 2011). Pemilihan alat analisis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa '*analytical hierarchy process*' merupakan salah satu alat atau model pengambilan keputusan dengan input utama adalah persepsi manusia.

Analytical Hierarchy Process' (AHP) merupakan salah satu metode yang memecahkan suatu masalah kompleks ke dalam kelompok-kelompok secara hirarki. Dengan menggunakan AHP, pembobotan suatu faktor dan subfaktor dapat dilakukan sesuai dengan persepsi manusia, sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang senyatanya. Dengan memasukkan unsur persepsi, maka metode AHP dapat mengatasi kelemahan utama pada metode pengambilan keputusan yang selama ini sering dikenal dengan kelemahan dalam mengubah data kualitatif kedalam bentuk kuantitatif. Selain itu juga, '*analytical hierarchy process*' (AHP) juga mampu memberikan prioritas alternatif dan melacak ketidak konsistenan dalam pertimbangan dan preferensi seorang responden (Saaty, T, 1993).

Indikator-indikator pengelolaan kawasan pesisir dibagi dalam kategori biologi, lingkungan hidup, sosial, ekonomi, politik dan kebutuhan yang menghubungkannya dengan indikator-indikator multidisiplin lainnya, Bowen dan Riley, (2003) dan Garcia, Staples dan Chesson (2000). Faktor dan Subfaktor Hirarki Kesejahteraan Nelayan desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Dalam rangka untuk memetakan strategi peningkatan kesejahteraan nelayan desa Pahlawan di kawasan pesisir.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian asosiatif adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara dua variabel atau lebih (Rusiadi; et al., 2014). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan karakteristik nelayan desa Pahlawan yang melibatkan 100 responden nelayan desa Pahlawan setempat dengan analisis statistik deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan asosiatif/kuantitatif. Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup tentang kesejahteraan sebagai variabel Y

yang ditinjau dari faktor tingkat kualitas pelayanan (X_1), pembangunan akses modal (X_2) dan kebijakan pemerintah (X_3) sebagai variabel X di Desa Pahlawan kecamatan Tanjung Tiram kabupaten BatuBara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran angket ke responden, wawancara dan observasi langsung ke Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram. Pengumpulan data sekunder dilakukan mencari data-data terkait yang dibutuhkan dengan melihat dokumen-dokumen di kantor kepala Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram. Penelitian ini menganalisis strategi AHP dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir di desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data antar ruang atau tempat (*crossing*). Penaksiran penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda. Penggunaan analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen (kualitas pelayanan, pembangunan akses modal, dan kebijakan pemerintah di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar diatas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Hal ini bahwa model regresi inibebas dari masalah heteroskedasitas.

Tabel 5.31

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.774 ^a	.600	.583	.85870	.600	35.583	4	95	.000	1.489

a. Predictors: (Constant), Pembangunan sarana dan prasarana, Kualitas pelayanan, Kebijakan pemerintah, Pembangunan akses modal

b. Dependent Variable: Peningkatan kesejahteraan nelayan

Hasil nilai R sebesar 0,774 sebagai nilai korelasi berganda artinya kualitas pelayanan, pembangunan akses modal dan kebijakan pemerintah dengan peningkatan kesejahteraan nelayan berada pada taraf hubungan erat.

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.208	.662		.313	.755
	Kualitas pelayanan	.090	.122	.065	.737	.463
	Pembangunan akses modal	.183	.110	.174	2.663	.002
	Kebijakan pemerintah	.337	.095	.365	3.552	.001

Hasil output SPSS tabel coefficients maka persamaan regresinya adalah :

$$Y = 0,208 + 0,090 + 0,183 + 0,337$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda :

1. Jika kualitas pelayanan, pembangunan akses modal dan kebijakan pemerintah tidak ditingkatkan maka peningkatan kesejahteraan nelayan akan menurun
2. Jika masyarakat Desa Pahlawan memiliki kualitas pelayanan semakin tinggi maka peningkatan kesejahteraan menurun namun tidak signifikan
3. Jika masyarakat Desa Pahlawan memiliki pembangunan akses modal lebih dari 1 maka peningkatan kesejahteraan nelayan akan meningkat signifikan.

4. Jika masyarakat Desa Pahlawan memiliki kebijakan pemerintah lebih dari 1 maka peningkatan kesejahteraan nelayan akan meningkat signifikan

Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.208	.662		.313	.755
	Kualitas pelayanan	.090	.122	.065	.737	.463
	Pembangunan akses modal	.183	.110	.174	2.663	.002
	Kebijakan pemerintah	.337	.095	.365	3.552	.001

Interpretasi Hasil Uji t

1. Variabel X_2 (Kualitas Pelayanan) Nilai Th (0,737) < Tt (1,96) dan nilai sig 0,463 > 0,005 maka H_a ditolak artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
2. Variabel X_3 (Pembangunan Akses Modal) Nilai Th (2,663) > Tt (1,96) dan nilai sig 0,002 < 0,005 maka H_a diterima artinya pembangunan akses modal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
3. Variabel X_1 (Kebijakan Pemerintah) Nilai Th (3,552) > Tt (1,96) dan nilai sig 0,001 < 0,005 maka H_a diterima artinya kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.

2) Uji F (Uji Hipotesis Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
a1	Regression	104.951	4	26.238	35.583	.000 ^b
	Residual	70.049	95	.737		
	Total	175.000	99			

a. Dependent Variable: Peningkatan kesejahteraan nelayan

b. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan, Pembangunan akses modal dan Kebijakan pemerintah

Nilai F_{hitung} pada tabel diatas F_{hitung} 35,583 > F_{tabel} 2,46 (n-k-1) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak dan artinya kualitas pelayanan, pembangunan akses modal dan kebijakan pemerintah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan nelayan.

3) Uji Determinasi

Model Summary dan R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.774 ^a	.600	.583	.85870	.600	35.583	4	95	.000	1.489

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh kualitas pelayanan (X_1), pembangunan akses modal (X_2) dan kebijakan pemerintah (X_3) terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan (Y), maka dapat diketahui melalui uji determinasi yaitu sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 D &= R^2 \times 100 \% \\
 &= 0,583 \times 100 \% \\
 &= 58,3 \%
 \end{aligned}$$

Nilai R Square diatas diketahui adalah 0,583 atau 58,3 menunjukkan sekitar 58,3% variabel peningkatan kesejahteraan (Y) dipengaruhi kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan, pembangunan

akses modal, pembangunan sarana dan prasarana. Sisanya 41,7% dipengaruhi oleh variabel yang teliti dalam penelitian ini contohnya pendapatan nelayan, pengeluaran nelayan dan lain-lain.

Hasil dan Analisis AHP

Alat analisis yang digunakan adalah ‘Analytical Hierarchy Process’ (AHP) yang telah dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1971 (Kuncoro, M, 2011). Pemilihan alat analisis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ‘analytical hierarchy process’ merupakan salah satu alat atau model pengambilan keputusan dengan input utama adalah persepsi manusia. ‘AHP’ merupakan salah satu metode yang memecahkan suatu masalah kompleks ke dalam kelompok-kelompok secara hirarki. Dengan menggunakan AHP, pembobotan suatu faktor dan sub faktor dapat dilakukan sesuai dengan persepsi manusia, sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang senyatanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan sub faktor, serta strategi manakah yang mempengaruhi/menentukan secara efektif dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

Prioritas Strategi Pemberdayaan Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara

Strategi	Prioritas
Pengembangan SDM Nelayan	1
Akses Modal/Investasi Pengembangan Usaha	2
Pengembangan Infrastruktur	3

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan tentang prioritas strategi peningkatan nelayan Desa Pahlawan yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan di kawasan pesisir Kecamatan Tanjung Tiram. Menurut persepsi kelompok tokoh masyarakat, para nelayan, dan lembaga pemerintah bahwa prioritas utama dalam strategi peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan adalah strategi pengembangan SDM nelayan.

Persepsi kelompok tokoh masyarakat, para nelayan, dan lembaga pemerintah menilai bahwa para nelayan. Desa Pahlawan dapat ditingkatkan kapabilitasnya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangannya dibidang usaha penangkapan ikan ataupun bidang-bidang lainnya yang dapat memperluas cakrawala berpikir para nelayan. Desa Pahlawan SDM yang telah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan teknologi akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan hidup yang terjadi, baik yang memberikan dampak positif maupun negatif. Suatu peluang kesempatan kerja yang tersedia sebagai dampak yang positif dari pembangunan kawasan pesisir akan mampu ditanggapi dengan positif jika SDM nelayan sudah dibekali dengan baik.

Demikian juga, penyesuaian yang memadai akan mampu dilakukan oleh para nelayan Desa Pahlawan yang kompeten dengan adanya perubahan lingkungan hidup yang ada dipantai dan laut. Selain itu pula, menurut kelompok tokoh masyarakat dan pemerintah, karakter SDM yang handal akan membuat para nelayan untuk mengelolah sumberdaya keuangan dengan baik, sehingga usaha penangkapan ikan dan usaha lainnya dapat ditangani dengan baik. Hal ini sejalan dengan berbagai program pemerintah yang memerlukan SDM yang handal dalam pengelolaan keuangan agar bantuan yang diberikan dapat digunakan secara berkelanjutan.

Strategi ketersediaan aksesibilitas modal/investasi dan pengembangan usaha dinilai sebagai prioritas strategi pemberdayaan nelayan Desa Pahlawan yang kedua untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan. Modal/investasi dan pengembangan usaha dapat menunjang upaya peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan. Penguatan-penguatan atas lembaga-lembaga non formal yang telah dibentuk oleh para nelayan Desa Pahlawan dapat terus ditingkatkan keberadaanya agar dapat menjadi wadah yang kokoh untuk membantu para nelayan Desa Pahlawan beserta dengan keluarganya. Hal ini menggambarkan besarnya motivasi para nelayan untuk membangun dirinya menjadi pribadi yang mandiri dan maju yang diimbangi dengan keseriusan pihak-pihak yang terkait agar dapat memberikan pembinaan yang proporsional dengan kebutuhan mereka.

Strategi pengembangan infrastruktur merupakan prioritas strategi yang dinilai penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan nelayan tradisioanal. Hal ini sangat menunjang usaha nelayan Desa Pahlawan terutama ketersediaan tempat tambatan perahu dan dermaga, ataupun fasilitas usaha lainnya

serta sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan. Dampak positif lainnya bagi para nelayan dengan adanya pembangunan pelabuhan adalah peningkatan usaha dan terbukanya kesempatan kerja yang baru bagi masyarakat dan berpengaruh pada pendapatan.

5. SIMPULAN

Tidak Adanya hubungan variabel kualitas pelayanan (X_1) terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan (Y) ditunjukkan oleh t hitung sebesar 0,737 dengan probabilitas sig 0,463 lebih besar dari $\alpha = 0.05$. Dengan hubungan seperti itu terkandung arti bahwa makin rendah/tidak baik variabel X_2 (Kualitas Pelayanan) maka akan rendah/tidak baik variabel Y (Peningkatan Kesejahteraan Nelayan). Adanya hubungan variabel pembangunan akses modal (X_2) terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan (Y) ditunjukkan oleh t hitung sebesar 2,663 dengan probabilitas sig 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Dengan hubungan seperti itu terkandung arti bahwa makin tinggi/baik variabel X_3 (Pembangunan Akses Modal) maka akan tinggi/baik variabel Y (Peningkatan Kesejahteraan Nelayan). Adanya hubungan variabel kebijakan pemerintah (X_3) terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan (Y) ditunjukkan oleh t hitung sebesar 3,552 dengan probabilitas sig 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Dengan hubungan seperti itu terkandung arti bahwa makin tinggi/baik variabel X_1 (Kebijakan Pemerintah) maka akan tinggi/baik variabel Y (Peningkatan Kesejahteraan Nelayan). Adanya hubungan variabel kualitas pelayanan X_1 , pembangunan akses modal X_2 dan kebijakan pemerintah X_3 tidak ada hubungan variabel terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan ditunjukkan oleh determinasi nilai *Adjusted S-square* yang diperoleh adalah sebesar 0,583 menunjukkan sekitar 58,3 % variabel Y peningkatan kesejahteraan nelayan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan X_1 , pembangunan akses modal X_2 dan kebijakan pemerintah X_3 terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan adalah 58,3 % sisanya 41,7 % dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hasil analisis AHP menunjukkan prioritas faktor adalah perubahan lingkungan hidup, perilaku adaptasi, dan pembangunan kawasan pesisir sedangkan prioritas sub kriteria secara berturut-turut adalah mutu lingkungan hidup, adaptasi fungsional, aksesibilitas, infrastruktur, kapabilitas SDM nelayan, adaptasi prosesus. Prioritas strategi peningkatan kesejahteraan nelayan Desa Pahlawan beserta kegiatannya yaitu: Strategi pengembangan SDM nelayan dengan prioritas kegiatan yaitu: pelatihan keterampilan yang menunjang minat dan kebutuhan nelayan Desa Pahlawan, termasuk teknik penangkapan ikan secara modern. Strategi aksesibilitas modal/investasi dan pengembangan usaha melalui: pemandirian kelompok nelayan dan pembinaan dan pengadaan koperasi nelayan Desa Pahlawan. Strategi Pengembangan Infrastruktur dan perbaikan lingkungan hidup: perbaikan infrastruktur nelayan dan tata kelolah lingkungan hidup nelayan Desa Pahlawan.

